



## DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA EKONOMI DAERAH

Shofwatun Hasna

STIE Insan Pembangunan, Bitung Curug Tangerang, Email: shofa\_elgo@yahoo.co.id

### INFO ARTIKEL

SEJARAH ARTIKEL  
Diterima Pertama  
30 September 2015

Dinyatakan Dapat Dimuat  
23 Desember 2015

### KEYWORDS:

*Fiscal decentralization,  
Economic activities,  
Dana bagi hasil,  
Dana alokasi umum,  
Dana alokasi khusus*

### ABSTRAK

*This study aims to analyze the fiscal decentralization impact to economic performance in Province of East Java for five years (2009-2013). The panel model chosen is random effect. The East Java income is growing up each year during 2009 until 2013. The target and realization of Regional Expenditure is also growing up in that periode even not used 100%. The analysis result shows that Revenue Sharing Fund (DBH), Miscellaneous Local Revenues, and Local Government Revenue (PAD) have positive impact to economic activities in East Java during that periode, but Special Allocation Funds (DAK) and General Allocation Funds (DAU) have no impact during research periode.*

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja perekonomian di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2013. Teknik estimasi yang digunakan adalah analisis data panel dengan random effect. Pendapatan daerah Jawa Timur periode tahun 2009 hingga 2013 terus mengalami kenaikan. Begitu pula dengan target dan realisasi belanja daerah pada periode tersebut terus mengalami kenaikan meski belum terealisasi 100%. Hasil regresi menunjukkan Dana Bagi Hasil (DBH), lain-lain pendapatan yang sah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdampak positif terhadap kinerja perekonomian, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terbukti tidak berdampak pada kinerja perekonomian Jawa Timur selama periode penelitian.

## 1. PENDAHULUAN

Jumlah pemerintah kabupaten/kota yang semakin berkembang di Indonesia menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah pusat, DPR/DPRD maupun masyarakat. Pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana pemerintah daerah (Pemda) tersebut dapat menyelenggarakan aktivitas di wilayahnya, terutama bagi pemerintahan daerah yang baru. Penyelenggaraan aktivitas tersebut tentunya terkait erat dengan masalah anggaran pendapatan dan belanja daerahnya, dengan kata lain, bagaimana suatu pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan pendapatan daerahnya, dan mengalokasikannya untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi suatu daerah dari sisi pendapatan dan pengeluaran, perlu dikelola dengan menyusun kebijakan yang tepat oleh pemerintah daerah itu sendiri dan pemerintah pusat.

Perbedaan struktur keuangan kota dengan keuangan nasional mulai terjadi sejak 2001 ketika Indonesia menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Desentralisasi dipandang sebagai bagian dari paket reformasi. Dalam hal ini, baik kota dan kabupaten diberi alokasi dana untuk meningkatkan efisiensi dan kompetensi dalam memberikan pelayanan publik serta merangsang pertumbuhan ekonomi (Bird dan Wallich, 1993:24).

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukan konsep baru di Indonesia, sudah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam prakteknya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal selama pemerintahan orde baru belum dapat mengurangi ketimpangan vertikal dan horisontal, yang ditunjukkan dengan tingginya derajat sentralisasi fiskal dan besarnya ketimpangan antar daerah dan wilayah (Uppal dan Suparmoko, 1986; Sjahfrizal, 1997).

Praktek internasional desentralisasi fiskal baru dijalankan pada 1 Januari 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah "money follows functions", yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah.

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2000 sumber-sumber penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Dana Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah (PKPD) merupakan mekanisme transfer pemerintah pusat-daerah yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (DBHP dan SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Mahi (2005) menyebutkan bahwa dana pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Anggaran daerah (SAL), pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan privatisasi kekayaan daerah yang dipisahkan. Besarnya PAD dan pembiayaan daerah dapat diklasifikasikan sebagai dana non PKPD, karena berasal dari pengelolaan fiskal daerah. Khusus pinjaman daerah pemerintah pusat masih khawatir dengan kondisi utang negara, sehingga belum mengizinkan penerbitan utang daerah. Idealnya semua pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi dengan menggunakan PAD, sehingga daerah menjadi benar-benar otonom. Selama tahun 2001–2003 peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan total pengeluaran APBD semakin menurun. Menurunnya peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan pengeluaran total dalam APBD mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan peranan mekanisme transfer dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

Tujuan utama pemberian dana perimbangan dalam kerangka otonomi daerah adalah untuk pemerataan kemampuan fiskal pada tiap daerah (*equalizing transfer*) (Ehtisham, 2002). Secara umum dana Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah (PKPD) terdiri dari bantuan umum (*block grant*) dan bantuan khusus (*specific grant*) (Davey, 1998). Penggunaan DAU, DBHP dan DBH SDA (*block grant*) diserahkan pada kebijakan masing-masing daerah. Pada awal penerapannya, DAU banyak dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran rutin terutama untuk belanja pegawai sebagai dampak pengalihan status pegawai pusat menjadi pegawai pemda (Isdijoso dan Wibowo, 2002). Sedangkan penggunaan DAK (*specific grant*) telah ditentukan oleh pemerintah pusat dengan suatu kewajiban, yaitu daerah penerima harus menyediakan 10% dana pendamping.

Kebijakan DAU mempunyai tujuan utama untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalance*). Melalui kebijakan bagi hasil SDA yang diharapkan masyarakat daerah dapat merasakan hasil dari sumber daya alam yang dimilikinya. Hal ini karena selama pemerintahan orde baru hasil SDA lebih banyak dinikmati oleh pemerintah pusat (Devas, 1989). Mekanisme bagi hasil SDA dan pajak bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) pusat-daerah.

Jawa Timur, meskipun termasuk sebagai daerah yang kaya akan SDA tetapi persebarannya tidak merata di seluruh daerah. Daerah kaya SDA misalnya Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Malang, mendapatkan dana bagi hasil yang relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah lain yang miskin sumber daya alam. Pada sisi yang lain Surabaya dan kota besar lainnya memperoleh dana bagi hasil pajak yang cukup besar, sebagai konsekuensi terkonsentrasinya pusat bisnis di ibukota provinsi. Fenomena seperti ini akan berdampak terhadap meningkatnya ketimpangan fiskal antar daerah.

Jawa Timur selama ini dikenal sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki posisi strategis, baik dari aspek ekonomi maupun dari sisi demografinya. Secara ekonomi, provinsi ini merupakan penghubung antara kawasan Timur dan Barat Indonesia, khususnya sebagai pintu gerbang perdagangan antar pulau dan daerah. Jawa timur juga merupakan provinsi besar dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak dan populasinya terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat.

Jawa Timur, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir setelah dimulainya desentralisasi, mengalami peningkatan kinerja daerah. Sejak desentralisasi, seperti halnya daerah lain, belanja pemerintah mengalami peningkatan yang pesat dan kinerja ekonomi mengalami kemajuan. PDRB secara riil meningkat hampir dua kali lipat. Realisasi belanja juga mengalami peningkatan yang signifikan. Angka kemiskinan pun mengalami penurunan. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Data BPS 2010 menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi dengan populasi penduduk miskin terbesar di Indonesia, yakni berjumlah 4.960.500 jiwa. Kemiskinan berpusat pada daerah yang perekonomiannya bergantung pada pertanian, padahal mayoritas penduduk Jawa Timur adalah bertani (Bank Dunia, 2011).

Jawa Timur memiliki pertumbuhan ekonomi yang meningkat cukup stabil sejak tahun 2005 dengan rata-rata di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Jawa Timur menjadi kontributor kedua terbesar bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2010, ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 6,7 persen, merupakan angka tertinggi di Jawa dan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur masih menduduki posisi terbesar di Jawa. Data tahun 2010 menunjukkan bahwa angka kemiskinan masih berada di atas angka nasional, dimana tingkat kemiskinan Jawa Timur sebesar 15,3 persen, sedangkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 13,3 persen (BPS, 2011).

Pola pertumbuhan ekonomi dilihat dari sisi kewilayahan di Jawa Timur menunjukkan adanya wilayah yang sangat maju dan wilayah yang masih tertinggal (Bank Dunia, 2011). Ini juga menjadi tantangan utama pembangunan Jawa Timur dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu memposisikan APBD provinsi Jawa Timur sebagai instrumen untuk mempercepat terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan upah memadai, yang mampu mengurangi angka kemiskinan. Mengingat besarnya potensi ekonomi dan masih cukup tingginya angka kemiskinan di Jawa Timur, maka target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur seharusnya berada jauh di atas target pertumbuhan nasional, yaitu rata-rata di atas 7 persen pertahun. Target tersebut perlu ditopang dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tata kelola APBD yang baik dapat menjadi stimulus pembangunan dengan bertumpu pada tiga

komponen utama, yaitu: (i) percepatan perbaikan kualitas sumber daya manusia, (ii) percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan mobilitas dan aktivitas ekonomi antar daerah, dan (iii) terjadinya percepatan transformasi struktural melalui industrialisasi yang berbasis pada pertanian dan/atau sumber daya alam lainnya, (Bank Dunia, 2011).

Jawa Timur membutuhkan sumber daya keuangan yang cukup untuk dapat mengatasi beberapa tantangan penting agar dapat meningkatkan pembangunan ekonomi. Hal paling utama adalah ruang fiskal pemerintah dan sumber-sumber pendapatan yang berkontribusi cukup signifikan untuk dapat mengalokasikan dana pembangunan bagi peningkatan kualitas infrastruktur, pendidikan dan pertanian.

Beberapa penelitian terdahulu tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi daerah diluar Jawa Timur, telah banyak ditemukan. Penelitian Annisa Irdhania (2009) di Kabupaten Bogor dengan menggunakan data *time series* 15 tahun, menjelaskan bahwa penerapan desentralisasi fiskal memberikan pengaruh yang positif dan nyata secara statistik terhadap komponen PDRB, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga, investasi, dan pengeluaran konsumsi pemerintah meningkat selama masa desentralisasi fiskal. Jadi, secara keseluruhan penerapan desentralisasi fiskal diduga memberikan pengaruh yang positif pada kinerja perekonomian. Artinya setelah diterapkan desentralisasi fiskal, kinerja perekonomian Kabupaten Bogor mengalami peningkatan yang signifikan. Variabel pendapatan *disposable*, populasi, dan total penerimaan keuangan pemerintah daerah memberikan kontribusi dengan nilai elastisitas yang positif dan nyata secara statistik terhadap kinerja perekonomian. Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan nyata secara statistik terhadap penerimaan retribusi Kabupaten Bogor, sedangkan dana transfer dipengaruhi secara positif dan nyata. Jika dikaitkan dengan kinerja perekonomian, penurunan pada retribusi ini akan membawa efek yang positif terhadap kinerja perekonomian Kabupaten Bogor. Penerapan desentralisasi fiskal tidak mempengaruhi variabel potensi keuangan lainnya secara signifikan. Variabel pendapatan perkapita, jumlah kamar hotel, suku bunga, total pengeluaran keuangan pemerintah, dan jumlah penduduk miskin mempengaruhi potensi keuangan Kabupaten Bogor dengan nilai elastisitas yang positif dan nyata secara statistik.

Yuliati (2002) melakukan penelitian di Kabupaten Tegal dengan menggunakan model persamaan simultan dan alat analisis SAS 6.0 menunjukkan bahwa kinerja ekonomi daerah lebih didorong oleh kecenderungan mengkonsumsi daripada investasi. Peningkatan perekonomian daerah akan meningkatkan pendapatan perkapita atau kapasitas pemajakan yang menggambarkan kemampuan penduduk dalam membayar pajak dan membeli jasa publik. Kebijakan desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan mempengaruhi kinerja ekonomi dan

potensi keuangan daerah, dan jika dibarengi dengan kebijakan peningkatan pengeluaran berdampak positif terhadap total penerimaan keuangan pemerintah daerah dan perekonomian. Selain itu juga ditemukan indikasi adanya inefisiensi dan inefektivitas alokasi anggaran akibat kurang optimalnya penerapan disiplin dan prioritas anggaran. Peluang untuk meningkatkan penerimaan daerah dipengaruhi oleh elastisitas pendapatan perkapita, kesesuaian basis pajak dengan basis ekonomi, elastisitas permintaan jasa publik, elastisitas harga publik, dan tingkat kebutuhan pengeluaran daerah.

Penelitian Hasugian (2006) di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah semakin rendah sesudah implementasi desentralisasi fiskal. Hal ini terlihat dari kecenderungan menurunnya rasio PAD terhadap penerimaan daerah. Kontribusi DAU selama periode analisis (2001-2004) masih sangat tinggi dengan menyumbang rata-rata 60-90 persen dari penerimaan daerah. Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis memiliki tingkat kemandirian yang rendah, sedangkan Kota Bandung dan Kabupaten Bekasi tergolong mempunyai tingkat kemandirian yang tinggi. Kabupaten Bekasi adalah wilayah dengan peningkatan PAD yang paling signifikan setelah penetapan dan pelaksanaan desentralisasi, yaitu sebesar 62 persen. Tetapi tingkat kemandirian di wilayah kabupaten-kota provinsi Jawa Barat masih tergolong rendah, karena kontribusi dana transfer yang masih tinggi.

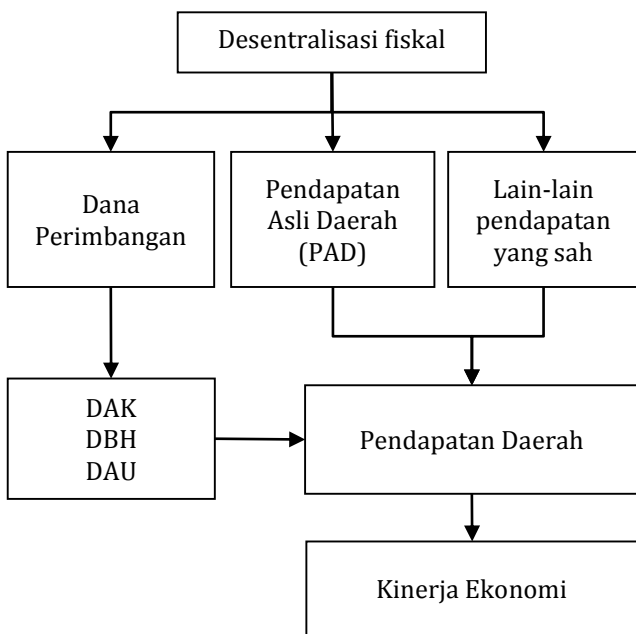
Hermani (2007) melakukan penelitian di Kota Tegal dan Kabupaten Brebes. Hasil analisis dengan menggunakan persamaan simultan dan alat analisis SAS 6.0, menyatakan kebijakan desentralisasi fiskal di kedua kota tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja fiskal daerah. Kebijakan peningkatan DAU, PAD, dan dana bagi hasil menunjukkan dampak yang besar terhadap peningkatan kinerja fiskal dan perekonomian daerah tersebut, serta bisa mengurangi tingkat kemiskinan.

Penelitian sejenis di Jawa Timur yang dilakukan oleh Utomo (2009) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal aspek pembelanjaan di Jawa Timur berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Fahrian (2013) juga melakukan penelitian di Jawa Timur pada 4 kabupaten dan 4 kota. Hasilnya adalah desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi daerah ternyata masih jarang dilakukan di Jawa Timur. Penelitian di Jawa Timur mayoritas membahas tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian yang sama di beberapa propinsi diluar Jawa Timur, mayoritas memasukkan banyak variabel eksogen kedalam model kinerja ekonomi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis secara khusus, hanya untuk variabel fiskal sebagai variabel eksogen, yang ingin membuktikan apakah desentralisasi fiskal yang terjadi

sejak tahun 2009 hingga 2013 berdampak positif terhadap kinerja ekonomi Jawa Timur atau tidak. Penelitian dengan hanya mengangkat variabel eksogen fiskal saja, diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas tentang peran fiskal pada kinerja perekonomian di Jawa Timur. Adapun kerangka dalam penelitian ini adalah,

Gambar 1 Kerangka Berpikir



Desentralisasi fiskal dibagi menjadi tiga komponen yaitu Dana Perimbangan (terdiri dari DAK, DBH dan DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, (Sjafrizal, 2012). Pemerintah daerah dituntut mampu mengelola dana desentralisasi fiskal secara efisien dan efektif untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi;

1. kinerja keuangan Jawa Timur periode 2009-2013;
2. dampak dana perimbangan (DAK, DBH, DAU), Lain-lain pendapatan yang sah, dan PAD, terhadap kinerja perekonomian di Jawa Timur.

## 2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1. Otonomi Daerah

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa/kata latin yaitu "autos" yang berarti "sendiri", dan "nomos" yang berarti "aturan". Sehingga otonomi diartikan pengundangan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Otonomi daerah yang sudah berjalan lebih dari enam tahun di negara kita diharapkan bukan hanya pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk menggeser kekuasaan. Hal itu ditegaskan oleh Kaloh (2002 : 7), bahwa otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi "daerah" dalam pengertian wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal. Otonomi daerah bukan hanya merupakan pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Berbagai manfaat dan argumen yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah tidak langsung dapat dianggap bahwa otonomi adalah sistem yang terbaik. Berbagai kelemahan masih menyertai pelaksanaan otonomi yang harus diwaspadai dalam pelaksanaannya. Remy Pnid'homme (dalam Sugiyanto, 2000) mencatat beberapa kelemahan dan dilema otonomi daerah, antara lain: 1) menciptakan kesenjangan antara daerah kaya dengan daerah miskin, 2) mengancam stabilisasi ekonomi akibat tidak efisiennya kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan fiskal, 3) mengurangi efisiensi akibat kurang representatifnya lembaga perwakilan rakyat dengan indikator masih lemahnya *public hearing*, 4) perluasan jaringan korupsi dari pusat menuju daerah.

### 2.2. Desentralisasi Fiskal

Asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.33 tahun 2004 dibagi menjadi tiga, yaitu: desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Konsekuensi dari pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah otonom, tidak lain adalah penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Saragih (2003:39) menyatakan bahwa desentralisasi adalah serahkannya sebagian atau seluruh wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah-daerah, sehingga daerah menerima kewenangan bersifat otonom, yakni dapat menentukan caranya sendiri berdasarkan prakarsa sendiri secara bebas. Perimbangan keuangan dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, yaitu pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi.

Kusaini (2006: 29) menjelaskan desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya

tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (*rules*) *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Bah1,2000: 19). Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan derivatif dari kebijakan otonomi daerah, melalui pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah. Artinya, semakin banyak wewenang yang dilimpahkan, maka kecenderungannya semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh daerah. Masalah keseimbangan anggaran menjadi masalah serius karena banyak pemerintah pusat tidak mengizinkan pemerintah daerah untuk melakukan utang kepada publik.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat menggunakan pendekatan *expenditure assignment* dan *revenue assignment*. Pendekatan *expenditure assignment* menyatakan bahwa terjadi perubahan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga peran *local public goods* meningkat. Kebijakan ini dapat dilakukan melalui dua tahap: Pertama; Menentukan secara umum batasan urusan pemerintah pusat dan daerah. Kedua; Membagi secara tegas urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara spesifik untuk urusan yang bersifat "*grey area*." Pendekatan ini mensyaratkan penentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM) setiap urusan yang dilimpahkan ke pemerintah daerah sudah teridentifikasi, sehingga besarnya standar pengeluaran minimum (*Standard Spending Assesment* = SSA) untuk setiap penyediaan barang publik yang didaerahkan dapat diketahui. Sedangkan ciri utama pendekatan *revenue assignment* yaitu memberikan peningkatan kemampuan keuangan, melalui alih sumber pembiayaan pusat kepada daerah, dalam rangka membiayai fungsi yang didesentralisasikan (Mahi, 2002; Lewis, 2001 dan 2003; LPEM FE-UI, 2001).

Penentuan sumber-sumber pembiayaan ke daerah dapat dilakukan dengan berpegangan pada *tax assignment*. Lima prinsip utama dalam menjalankan *tax assignment* dapat diuraikan sebagai berikut: 1) *Progressive redistributive taxes should be centralized*, pajak untuk kepentingan redistribusi pendapatan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat 2) *Taxes suitable for economic stabilization should be centralized*, pajak untuk kepentingan stabilisasi perekonomian sebaiknya dipungut oleh pemerintah pusat. 3) *Unequal tax bases among jurisdictions should be centralized*. Misalnya pembebanan pajak terhadap deposit sumber daya alam menjadi tanggungjawab pemerintah pusat untuk menghindari *geographical inequities* dan menjaga *allocative distortions*. 4) *Taxes on mobile factors of production should be centralized*. Objek pajak yang relatif tidak bergerak akan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Artinya bahwa

pemerintah pada level yang lebih rendah akan menghindari objek pajak yang mudah berpindah, karena pajak tersebut dapat mendistorsi aktivitas perekonomian. 5) *Residence-based taxes, such as excise, should be levied by local authorities*. Hal ini dimungkinkan karena tidak ada potensi perpindahan antar daerah (Musgrave, 1983; Mahi, 2002 dan 2005)

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dikatakan bahwa otonomi daerah berarti adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri berdasarkan pengertian dan substansi dari desentralisasi, yang berarti otonomi dan desentralisasi tidak dapat dipisahkan dan saling memberi arti. Namun, terdapat perbedaan pengertian dari keduanya. Dalam desentralisasi harus ada pendistribusian wewenang atau kekuasaan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada bawahnya. Sedangkan otonomi menurut Saragih (2003:40), yaitu adanya kebebasan menjalankan atau melaksanakan sesuatu oleh suatu bagian wilayah dalam kaitannya dengan negara. Desentralisasi sendiri memiliki satu komponen utama yang disebut desentralisasi fiskal, dan otonomi daerah membutuhkan desentralisasi fiskal untuk mendukung tercapainya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Kebijakan desentralisasi untuk otonomi menurut Rasyid (2007:16) adalah salah satu bentuk implementasi dari kebijakan demokratisasi. Dalam konteks administrasi pemerintahan, demokratisasi bergandengan dengan desentralisasi. Artinya, tidak ada demokratisasi pemerintahan tanpa desentralisasi. Ini terutama relevan dengan negara yang wilayahnya luas dan berpenduduk besar, karena diasumsikan rakyat sebagai pihak yang berdaulat bukan saja harus dilayani lebih baik, tetapi juga harus diberi akses yang cukup didalam proses pengambilan keputusan, (Rasyid, 2007: 17). Kebijakan desentralisasi fiskal banyak dipergunakan oleh negara-negara sedang berkembang untuk menghindari ketidakefisienan dan ketidakefektifan pemerintahan, ketidakstabilan ekonomi makro, dan ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi, (Bahl dan Linn, 1992:384).

Sejak diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal struktur keuangan daerah di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Desentralisasi fiskal di Jawa Timur, dijelaskan oleh BPS (2012;2013), dibagi menjadi tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAK, DBH pajak, DBH non pajak, DAU), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Faktor-faktor tersebut dijadikan variabel eksogen dalam penelitian ini.

### 2.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Komponen PAD dalam BPS (2014) terdiri dari,

### 1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian golongan C, parkir dan lain-lain.

### 2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemda secara langsung dan nyata kepada pembayar. Retribusi daerah hanya dapat dipungut bilamana daerah memberikan jasa pelayanan tertentu kepada masyarakat. Retribusi daerah meliputi antara lain, pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, pelayanan pendidikan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan/atau pertokoan, terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi/olahraga, ijin mendirikan bangunan, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek dan lain-lain.

### 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Ini adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

### 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Ini merupakan pendapatan daerah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Besar kecilnya PAD yang dapat diterima oleh suatu kota sangat ditentukan oleh dua hal yaitu potensi penerimaan dan tarif pajak yang ditetapkan dengan peraturan daerah setempat. Potensi PAD sangat ditentukan oleh perkembangan jumlah, ukuran dan kualitas objek pajak bersangkutan. Sedangkan tarif pajak ditentukan oleh pemerintah daerah setempat dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan wajib pajak di kota bersangkutan. Selain itu, besar kecilnya PAD juga sangat ditentukan oleh perkembangan kegiatan perekonomian daerah bersangkutan. Daerah perkotaan akan mempunyai potensi penerimaan PAD yang lebih besar dibanding kabupaten, karena jumlah hotel dan restoran, bangunan, kendaraan bermotor serta BUMD yang relatif lebih banyak di perkotaan, (Sjafrizal, 2012:274-275).

### 2.2.2. Dana Perimbangan

Penetapan alokasi dana perimbangan di Indonesia dilakukan dalam rangka penerapan prinsip desentralisasi fiskal. Sistem alokasi dana ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, baik propinsi, kabupaten dan kota, (Yunasman, 2007:1). Sasaran utama dalam hal ini adalah mewujudkan keseimbangan dana antara pusat dan daerah sehingga dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku bahwa Dana perimbangan yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam APBN minimum 25% dapat dialokasikan ke wilayah dalam 3 bentuk, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) baik dari pajak maupun sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), (Sjafrizal, 2012:134).

DBH digolongkan menjadi dua, yaitu DBH pajak dan DBH non pajak. DBH Pajak terdiri atas penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh pasal 21 orang pribadi, dan lain-lain. Sedangkan DBH non pajak terdiri atas iuran hak hak pengusaha hutan (IHPH), provinsi sumber daya hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah Negara, *land rent*, iuran eksplorasi/eksploitasi/*royalty*, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

DAU adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Pemerintah menetapkan alokasi transfer dana (DAU) yang berbeda. Daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi akan mendapat pasokan dana yang lebih kecil daripada daerah yang kapasitas fiskalnya rendah. Pemberian transfer ini bertujuan untuk menjamin tercapainya standar pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan horizontal (antar daerah) dan kesenjangan vertikal (pusat-daerah) (Simanjuntak dalam Abdullah dan Halim 2004, Wurzel 1998).

DAK adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, 1) kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum, 2) kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional, 3) kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil. DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

### 2.2.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Ini adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat serta dari daerah lainnya, mencakup pendapatan hibah, dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dana otonomi khusus dari pemerintah, bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, serta pendapatan yang sah lainnya.

### 2.3. Manfaat dan Kerugian dari Desentralisasi Fiskal

Pentingnya desentralisasi fiskal menjadi wacana dua kelompok yang berbeda argumentasi. Kelompok pertama, desentralisasi fiskal itu penting karena dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan akuntabilitas, dan peningkatan mobilisasi dana. Kelompok kedua, tidak satupun dari manfaat tersebut yang akan berhasil dicapai oleh negara yang preferensi penduduknya hampir tidak mungkin diakomodir dalam anggaran pemerintah, sedangkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah mendekati nihil. Perspektif dari desentralisasi fiskal ini nampaknya cenderung meningkatkan biaya, mengurangi efisiensi pelayanan pemerintah, dan mungkin bisa menyebabkan kesenjangan yang lebih parah serta ketidakstabilan makroekonomi (Prud'Homme, 1994 dalam Yuliyati, 2002).

Beberapa dampak langsung terhadap pemerintah daerah seperti yang ditulis oleh Sinaga, et all (2005) adalah:

1. Bagi hasil dari pemerintah pusat makin besar seperti: Bagi hasil Sumber Daya Alam (BHSDA), Bagi Hasil Pajak (BHTX), DAU, dan DAK.
2. Kewenangan menarik pajak dan retribusi.
3. Kebebasan menggunakan anggaran dasar dalam arti tanpa menunggu petunjuk pusat.
4. Kewenangan menerbitkan perda dalam kepentingan pembangunan daerah.
5. Kewenangan melakukan pinjaman.

Menurut Kaho (2003) dalam Hermani (2007), ada beberapa kerugian yang bisa ditimbulkan akibat desentralisasi fiskal yaitu:

1. Karena besarnya organ-organ pemerintah maka struktur pemerintahan menjadi kompleks sehingga mempersulit koordinasi.
2. Keseimbangan dan keserasian antar kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu.
3. Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat menimbulkan apa yang disebut daerah-isme.
4. Keputusan yang diambil dapat memakan waktu yang cukup lama.
5. Dalam menyelenggarakan desentralisasi diperlukan biaya yang lebih banyak.

### 2.4. Kinerja Ekonomi

Kinerja Ekonomi diartikan sebagai gambaran bagus tidaknya perekonomian suatu daerah. Variabel-variabel yang dapat memperlhatkannya adalah

variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan *gini ratio*, (Irdhania, 2009:35). Kinerja ekonomi daerah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel PDRB. PDRB memuat data informasi tentang kondisi riil suatu daerah pada saat tertentu yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu wilayah.

Sadono Sukirno (2008:17) juga menjelaskan bahwa, ada beberapa jenis data perekonomian yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menilai kinerja ekonomi nasional,

1. pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan pendaptan perkapita,
2. tingkat pengangguran,
3. tingkat inflasi,
4. kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran,
5. kestabilan nilai uang domestik.

Kinerja pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu wilayah secara makro pada umumnya dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB. Persamaan PDRB adalah sebagai berikut (Setiono, 2011: 175),

$$Y = C + I + G + (E-M) \dots\dots\dots (1.1)$$

Dimana:

Y : Produk domestik bruto wilayah

C : konsumsi masyarakat

I : investasi

G : belanja pemerintah

E-M : nilai hasil perdagangan bersih antar wilayah

Persamaan diatas memperlihatkan bahwa nilai total produk bruto wilayah berbanding lurus dengan C, I, G, dan E-M. Komponen konsumsi (C) dapat meningkat akibat adanya kiriman dana reguler dari penduduk wilayah tersebut yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Sedangkan nilai investasi (I) tidak selalu bergantung kepada tabungan lokal, tetapi juga meningkat dengan adanya penanaman modal asing. Sementara itu, belanja pemerintah (G) pada umumnya merupakan input dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Atas dasar beberapa tinjauan literatur tersebut maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah, diduga dana perimbangan (DAK, DBH, DAU), Lain-lain Pendapatan yang sah, dan PAD berdampak positif terhadap kinerja perekonomian Jawa Timur. Penerapan prinsip desentralisasi fiskal di Indonesia dengan jalan menetapkan alokasi dana keuangan yang berimbang antara pusat dan daerah, baik propinsi, kabupaten dan kota, ditujukan agar tercipta kinerja ekonomi yang optimal pada masing-masing kabupaten/kota secara keseluruhan sehingga tidak tercipta ketimpangan pembangunan.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Data BPS diambil dari buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota dan buku Keuangan Kabupaten/kota. Data sekunder yang digunakan adalah data panel, yaitu penggabungan dari data *cross section* sebanyak 38 kabupaten/ kota di Jawa Timur dan data *time series* dari tahun 2009-2013. Data sekunder yang diperoleh dari data statistik dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data panel. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan software *Eviews6* agar proses pengolahan data lebih cepat dan akurat.

### 3.1. Panel Data Analysis

Ariefanto (2012: 150) menjelaskan bahwa terdapat dua tipe pemodelan data panel yaitu Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Pemodelan ini berdasarkan asumsi apakah karakter residual bersifat konstan atau random.

#### 3.1.1. Fixed Effect Model

$$y_{it} = \alpha_0 + \sum_{j=1}^k \alpha_j X_{j,it} + u_{it} \quad (2.1)$$

dimana

$$u_{it} = e + \sum_{i=1}^N D_i^c v_i + \sum_{t=1}^{T-1} D_t^r w_t \quad (2.2)$$

Dimana  $D_i^c$  dan  $D_t^r$  adalah variabel *dummy* sebanyak  $N-1$  dan  $T-1$  untuk mengidentifikasi residual spesifik *cross section* dan urutan waktu yang bersifat konstan. Dengan memasukkan (2.2) ke (2.1) maka diperoleh

$$y_{it} = \alpha_0 + \sum \alpha_j X_{j,it} + \sum_{i=1}^{N-1} D_i^c v_i + \sum_{t=1}^{T-1} D_t^r w_t + e \quad (2.3)$$

#### 3.1.2. Random Effect Model

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{it1} + \dots + \beta_k x_{itk} + \alpha_i + u_{it} \quad (3.1)$$

Model random effect dalam Ariefanto (2012:151-152), digunakan ketika *unobserved effect*  $\alpha_i$  dapat diasumsikan tidak berkorelasi dengan satu/lebih variabel bebas. Model (3.1) dapat dimodelkan dengan menggunakan composite error term,

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{it1} + \dots + \beta_k x_{itk} + v_{it} \quad (3.2)$$

Karena  $\alpha_i$  selalu ada pada composite error term pada setiap periode waktu, maka  $v_{it}$  mengalami serial correlation. Dapat ditunjukkan bahwa:

$$Corr(v_{it}, v_{is}) = \frac{\sigma_\alpha^2}{\sigma_\alpha^2 + \sigma_u^2}; t \neq s \quad (3.3)$$

Kemudian mengoreksi keberadaan *serial correlation* dengan prosedur GLS. Namun demikian agar prosedur

ini efektif data harus memiliki  $N$  yang lebih besar daripada  $T$ . Dengan GLS dilakukan transformasi pada setiap regressor dan variabel terikat melalui suatu koefisien  $\lambda$ , dimana

$$\lambda = 1 - \left( \frac{\sigma_u^2}{\sigma_\alpha^2 + T\sigma_\alpha^2} \right)^{1/2} \quad (3.4)$$

Estimator ini selanjutnya digunakan untuk mentransformasi persamaan 3.1 menjadi

$$y_{it} - \hat{\lambda}y_i = \beta_0(1 - \hat{\lambda}) + \beta_1(x_{it1} - \hat{\lambda}x_{i1}) + \dots + \beta_k(x_{itk} - \hat{\lambda}x_{ik}) + (v_{it} - \hat{\lambda}v_i) \quad (3.5)$$

### 3.2. Pemilihan Model Terbaik

Juanda (2012:183) menjelaskan bahwa pemilihan model antara pooled atau panel adalah dengan Uji Chow atau Likelihood Test Ratio, yaitu dengan melihat signifikansi dari  $F$  hitung. Uji Chow melihat konsistensi pendugaan dengan *fixed effect* untuk memilih antara *fixed effect* atau *pooled*.

$H_0$ : Probability value  $> \alpha$  (*pooled* lebih baik)

$H_1$ : Probability value  $< \alpha$  (*fixed effect* lebih baik).

Pemilihan model panel antara *fixed effect* atau *random effect* pada penelitian ini didasarkan pada Nachrowi (2006:318) yang menyebutkan pendapat pakar bahwa pemilihan *fixed* atau *random effect* dapat dilakukan dengan pertimbangan tujuan analisis, atau ada pula kemungkinan data yang digunakan atas dasar pembuatan model hanya dapat diolah oleh salah satu model saja akibat persoalan berbagai teknis matematis yang melandasi perhitungan. Misalnya, *fixed effect* hanya dapat dilakukan jika jumlah individu lebih besar dibanding jumlah koefisien termasuk intercept. Beberapa ahli ekonometri membuktikan secara matematis dimana dikatakan bahwa:

1. Jika data panel mempunyai jumlah waktu ( $T$ ) lebih besar daripada jumlah individu ( $N$ ), maka disarankan menggunakan *fixed effect*.
2. Jika data panel mempunyai jumlah waktu ( $T$ ) lebih kecil daripada jumlah individu ( $N$ ), maka disarankan menggunakan *random effect*.

Dengan bersandar pada literatur yang ada maka model panel dalam penelitian ini mengarah pada *random effect*, karena data penelitian ini memiliki jumlah individu yang lebih besar daripada jumlah waktu.

### 3.3. Model Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa kinerja ekonomi dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB, dimana persamaan PDRB adalah,

$$Y = C + I + G + (E-M)$$

maka penelitian ini memodifikasi persamaan PDRB diatas kedalam bentuk yang lebih sederhana, yakni hanya mengangkat faktor belanja pemerintah ( $G$ ). Belanja pemerintah pada umumnya merupakan input dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



(APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun dalam penelitian ini, aspek yang diteliti hanya aspek pendapatan yang terdiri dari pendapatan daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sehingga rancangan model yang dibangun dalam penelitian ini adalah,

$$PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log\_DAK_{it} + \beta_2 DBH_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 SAH_{it} + \beta_5 PAD_{it} + \varepsilon_{it}$$

dimana,

$PDRB_i$  : PDRB masing-masing kabupaten/kota yang mewakili variabel kinerja ekonomi dalam juta rupiah

$DAK_i$  : Dana Alokasi Khusus masing-masing kabupaten/kota dalam juta rupiah

$DBH_i$  : Penjumlahan dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Non-Pajak masing-masing kabupaten/kota dalam juta rupiah

$DAU_i$  : Dana Alokasi Umum masing-masing kabupaten/kota dalam juta rupiah

$SAH_i$  : Lain-lain Pendapatan yang Sah masing-masing kabupaten/kota dalam juta rupiah

$PAD_i$  : Pendapatan Asli Daerah masing-masing kabupaten/kota dalam juta rupiah

$\varepsilon$  : error term

## 4. HASIL ANALISIS

### 4.1. Hasil Uji Chow

Langkah pertama dalam pemilihan model terbaik adalah dengan Uji Chow yaitu melihat konsistensi pendugaan dengan fixed effect untuk memilih antara fixed effect atau pooled. Hasil uji *Chow* menunjukkan bahwa penggunaan model fixed effect lebih tepat, karena *probability value* dari F statistik signifikan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa model panel *fixed effect* lebih baik digunakan daripada *pooled/OLS*. Perhatikan tabel 1.

Tabel 1 Uji Chow

Effects Test	Statistic	Prob.
Cross-section F	117.95	0.0
Cross-section Chi-square	648.05	0.0

Sedangkan untuk pemilihan model panel antara fixed effect atau random effect bersandar pada pendapat pakar dalam Nachrowi (2006). Data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa  $N=38$  dan  $T=4$ , maka dapat ditentukan bahwa model yang terpilih dalam penelitian ini adalah random effect karena  $N$  (jumlah individu) >  $T$  (jumlah waktu).

### 4.2. Uji Hipotesa dan Signifikansi Model Panel Random Effect

Hasil estimasi model melalui pengolahan data dengan software *Eviews6* ditampilkan dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Hasil Estimasi\_1

Variable	Coefficient
C	6639034
DAK?	5.119
DBH?	**5.764
DAU?	-1.444
SAH?	**3.859
PAD?	**16.912
R <sup>2</sup>	0.5238

Keterangan: \*\*signifikan pada  $\alpha = 0.05$

Hasil estimasi *random effect* menunjukkan bahwa hanya tiga variabel yang signifikan berdampak variabel PDRB, yaitu DBH, Lain-lain pendapatan yang sah, dan PAD. Sedangkan DAK dan DAU terbukti tidak berdampak terhadap variabel PDRB.

Langkah selanjutnya adalah melakukan regresi untuk tiga variabel yang signifikan, dan hasilnya adalah sebagai berikut,

Tabel 3 Hasil Estimasi\_2

Variable	Coefficient
C	6426026
DBH?	**4.365
SAH?	**3.053
PAD?	**15.93
R <sup>2</sup>	0.5248

Keterangan: \*\*signifikan pada  $\alpha = 0.05$

Model ini memiliki  $R^2 = 0.525$  yang berarti bahwa model mampu menjelaskan variabel endogen sebesar 52%, sedangkan 48% dijelaskan oleh variabel diluar model. Hasil regresi menunjukkan bahwa diantara 3 variabel eksogen tersebut yang paling berpengaruh terhadap kinerja ekonomi adalah PAD. Model penelitian ini adalah sebagai berikut,

$$PDRB_{it} = 6426026 + 4.365 DBH_{it} + 3.053 DAU_{it} + 15.93 PAD_{it}$$

## 5. PEMBAHASAN

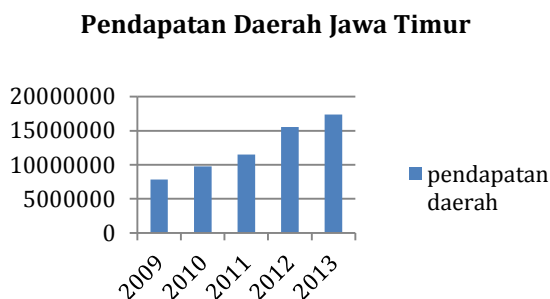
### 5.1. Kinerja Keuangan Jawa Timur Periode 2009-2013

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek pendapatan dan aspek belanja serta aspek pembiayaan. Aspek pendapatan terdiri dari pendapatan daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui, 1) optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah, 2) peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah, 3) peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan, dan 4) kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dibagi menjadi tiga komponen, PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Berdasarkan data selama tahun 2009-2013 perkembangan pendapatan daerah provinsi Jawa Timur cukup baik dan mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 total pendapatan daerah adalah sebesar 7,82 triliun lebih. Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2013 menjadi 17,39 triliun lebih dengan peningkatan rata-rata 22,40%, (RPJMD 2014-2019 dalam Biro Kesra Jatim). Peningkatan pendapatan Jawa Timur periode 2009-2013 dapat dilihat dalam grafik berikut.

Grafik 1 Pendapatan Daerah Jawa Timur

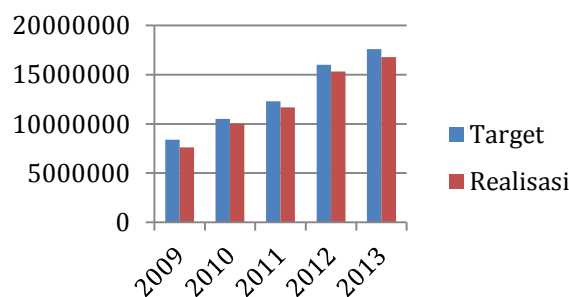


Pada aspek belanja daerah, disebutkan pada peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota. Dana tersebut terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu, yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah, yang ditetapkan berdasar aturan undang-undang. Belanja daerah dikelompokkan kedalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang penganggarnya tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung terkait secara langsung dengan program dan kegiatan.

APBD Jawa Timur selama kurun waktu 2009-2013 mengalami perkembangan yang terus meningkat. Pada RPJMD 2014-2019 oleh Biro Kesra Jatim disebutkan bahwa tahun 2009 kekuatan belanja daerah sebesar 7,60 triliun lebih dan tahun 2013 menjadi 16,78 triliun lebih dengan peningkatan rata-rata 22,27%. Realisasi belanja setiap tahunnya selama periode 2009-2013 mengalami kenaikan yaitu rata-rata pertahun sebesar 26,10% untuk belanja tidak langsung dan 17,39% untuk belanja langsung. Apabila dibandingkan antara target dan realisasi dapat

diketahui bahwa realisasi belanja belum mencapai 100%. Hal ini dikarenakan pedoman pelaksanaan DAK datangnya sering terlambat. Selain itu penggunaan DBH juga dibatasi oleh peraturan menteri keuangan No 84/PMK.07/2008 tentang penggunaan DBH cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi DBH cukai tembakau sebagaimana telah diubah oleh peraturan menteri 20/PMK.07/2009. Oleh karena itu daerah sangat berhati-hati dalam penggunaannya sehingga berdampak pada realisasi penyerapan anggaran. Namun demikian dari tahun ketahun realisasi belanja daerah semakin meningkat meski belum mencapai 100%. Target dan realisasi Belanja Daerah Jawa Timur dapat dilihat pada grafik berikut ini,

Grafik 2 Target dan Realisasi Belanja Daerah Jawa Timur



## 5.2. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi

Transfer pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu meningkatkan kinerja ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Daerah yang mendapat alokasi fiskal yang lebih besar dari pemerintah akan cenderung memiliki kinerja ekonomi yang lebih bagus. Hal ini akan mendorong proses pembangunan melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi.

Jawa Timur dapat digolongkan kedalam tiga tingkat ekonomi, yaitu tingkat ekonomi tinggi, menengah dan rendah. Daerah tingkat ekonomi tinggi adalah daerah dengan PDRB lebih dari 10 Triliun per tahun periode 2009-2013. Daerah ekonomi rendah memiliki PDRB 5 hingga 10 Triliun. Sedangkan daerah ekonomi rendah memiliki PDRB kurang dari 5 Triliun. Golongan tingkat ekonomi akan digunakan dalam mempermudah analisis pada penelitian ini, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4 Tingkat Ekonomi Kabupaten/Kota

Tinggi	Menengah	Rendah
Kota Surabaya	Tuban	Situbondo
Sidoarjo	Bojonegoro	Bangkalan

Tinggi	Menengah	Rendah
Kota Kediri	Mojokerto	Ponorogo
Gresik	Tulungagung	Magetan
Malang	Kediri	Bondowoso
Kota Malang	Pasuruan	Ngawi
Jember	Probolinggo	Trenggalek
Banyuwangi	Jombang	Madiun
Kota Blitar	Lumajang	Sampang
	Lamongan	Pamekasan
	Blitar	K. Madiun
	Nganjuk	K. Probolinggo
	Sumenep	K. Batu
		Pacitan
		K. Mojokerto
		Kota
		Pasuruan

Hasil regresi *random effect* memperlihatkan nilai *individual effect* untuk masing-masing kabupaten/kota. Nilai *individual effect* tertinggi adalah Kota Surabaya, disusul kemudian oleh Kota Kediri, Sidoarjo dan Gresik, dimana masing-masing memiliki nilai *individual effect* yang positif. Sedangkan 4 daerah yang memiliki *individual effect* terendah adalah Kota Batu, Pacitan, Kota Mojokerto, dan Kota Pasuruan, dimana masing-masing memiliki nilai *individual effect* negatif yaitu -0.5353. Perhatikan tabel 5 berikut ini.

Tabel 5 Nilai *Individual Effect* per Kabupate/Kota

Daerah	ind. Efct	Daerah	ind.efct
Pacitan	-5901302	Magetan	-4464228
Ponorogo	-4768886	Ngawi	-4577905
Trenggalek	-4699319	Bojonegoro	-1770241
Tulungagung	-593596	Tuban	-452474
Blitar	-2488135	Lamongan	-2570130
Kediri	-977554	Gresik	5873332
Malang	4894129	Bangkalan	-4515881
Lumajang	-1562893	Sampang	-4651706
Jember	1604455	Pamekasan	-5713220
Banyuwangi	2480094	Sumenep	-2771995
Bondowoso	-4832948	Kota Kediri	14784638
Situbondo	-3994591	Kota Blitar	-1263794
Probolinggo	-1099692	Kota Malang	4739917
Pasuruan	-2566342	Kota Probolingg	-5487802
Sidoarjo	11655817	Kota Pasuruan	-6114549
Mojokerto	-549345	Kota Mojokerto	-6009151
Jombang	-2424651	Kota Madiun	-5338349
Nganjuk	-3055528	Kota Surabaya	59451070
Madiun	-4606252	Kota Batu	-5660993

Nilai *individual effect* tersebut menunjukkan kinerja ekonomi di setiap kabupaten/kota ketika dana fiskal dianggap 0. Nilai *intercept* tertinggi terjadi di kota Surabaya sebesar 59451070 yang berarti bahwa ketika dana fiskal dianggap 0, maka PDRB Surabaya adalah sebesar 59.451.070 rupiah. Ini menunjukkan bahwa masih banyak faktor yang memberikan dampak positif pada PDRB Surabaya. Hal ini jelas terlihat karena Surabaya adalah ibukota provinsi dengan mobilitas

tinggi dan merupakan daerah kawasan industri, sehingga Surabaya mampu mandiri tanpa bergantung pada alokasi dana fiskal dari pemerintah.

Nilai *individual effect* juga bernilai positif pada kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur, yaitu terjadi di 8 daerah dengan tingkat ekonomi tinggi. Daerah-daerah tersebut mempunyai kepadatan penduduk tinggi karena merupakan kawasan industri, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kota Kediri. Dua daerah lain yaitu Kabupaten Jember dan Kota Malang merupakan daerah pusat pendidikan sedangkan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Malang adalah daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Kedelapan daerah tersebut merupakan daerah yang tetap produktif meski dalam kondisi dimana dana fiskal dianggap 0.

Ini menunjukkan bahwa daerah yang mampu secara mandiri mengelola pertumbuhan ekonominya dengan baik hanya terjadi di 8 daerah di Jawa Timur. Sedangkan 30 daerah yang lain dengan nilai *individual effect* negatif menunjukkan pertumbuhan ekonominya sangat bergantung kepada dana fiskal dan transfer dana pembangunan dari pemerintah pusat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perhatian pemerintah Jawa Timur masih kurang terhadap daerah-daerah tertinggal, khususnya perhatian dalam mendorong daerah tertinggal untuk lebih produktif menggali kekayaan dan kemampuan daerahnya sendiri dengan dana fiskal yang ada. Sebanyak 79% dari seluruh daerah yang ada belum mampu mempergunakan dana fiskal untuk menggali potensi daerahnya secara mandiri demi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

### 5.2.1. Dampak Dana Perimbangan (DAK, DBH, DAU) terhadap Kinerja Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Dana perimbangan yang dialokasikan pemerintah propinsi kepada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur yang terdiri dari DAK, DBH dan DAU, memperlihatkan bahwa DAK dan DAU terbukti tidak memberikan dampak terhadap kinerja ekonomi Jawa Timur, sedangkan DBH berdampak positif.

#### 5.2.1.1. DAK

Data realisasi dari DAK tahun 2009 memperlihatkan bahwa realisasi DAK digunakan untuk 13 sektor yaitu, pendidikan, pelayanan dasar, pelayanan rujukan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, prasarana pedesaan, dan perdagangan (Sumber <http://www.bappenas.go.id>).

Daerah yang merealisasikan DAK secara optimal untuk 13 sektor tersebut hanya 21 daerah, yang terdiri dari 9 daerah ekonomi rendah, 6 daerah ekonomi menengah dan 6 daerah ekonomi tinggi. Sedangkan 17 daerah lainnya merealisasikan DAK kurang dari 100% dimana mayoritas berasal dari daerah dengan tingkat ekonomi menengah. Terdapat fenomena yang janggal dalam kasus ini, dimana DAK dimanfaatkan secara optimal oleh semua daerah kaya selain Kabupaten

Malang sedangkan mayoritas daerah ekonomi menengah kurang mampu memanfaatkan DAK secara optimal, (Sumber PPPD 2009, data diolah).

Mayoritas kabupaten/kota dengan tingkat ekonomi menengah di Jawa Timur ternyata masih banyak yang belum merealisasikan DAK secara keseluruhan. Padahal, komponen DAK meningkat cukup tinggi sekitar 14 persen dari pendapatan daerah per tahunnya (dari Rp. 1,1 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp. 1,7 triliun pada tahun 2010). Secara rata-rata setiap kabupaten/kota di Jawa Timur menerima DAK sebesar 44 miliar rupiah (jika menggunakan data 2010), yang sebagian besar atau sekitar 51 persen dana DAK dialokasikan untuk pendidikan. Sedangkan porsi DAK untuk sektor infrastruktur di Jawa Timur hanya sebesar 20 persen dan hanya 5 persen untuk sektor pertanian, atau jika dihitung dari rata-rata per kabupaten/kota maka nilainya sebesar Rp. 9 miliar untuk infrastruktur dan 2,1 miliar rupiah untuk pertanian, (Sumber <http://www.bappenas.go.id>).

Realisasi DAK yang tidak optimal serta besaran DAK yang kurang untuk alokasi infrastruktur dan pertanian inilah yang merupakan penyebab DAK tidak berdampak terhadap kinerja ekonomi di Jawa Timur periode 2009-2013.

#### **5.2.1.2. DBH**

Hasil regresi menunjukkan bahwa DBH berdampak positif terhadap kinerja ekonomi, diperoleh koefisien sebesar 4,36 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 juta DBH dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto sebesar 4,4 juta.

DBH terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil non pajak, salah satunya dari bagi hasil pengelolaan sumber daya alam. Hampir seluruh pendapatan bagi hasil pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Jawa Timur berasal dari bagi hasil pajak. Porsi bagi hasil pajak secara rata-rata mencapai 98 persen dari seluruh pendapatan bagi hasil selama 2006-2010. Sedangkan untuk porsi bagi hasil sumber daya alam di Jawa Timur sangat minim, yaitu rata-rata sebesar 2 persen dari total bagi hasil SDA Jawa Timur. Pada tahun 2008 dana bagi hasil ini meningkat cukup tinggi dari Rp. 75 miliar menjadi Rp. 383 miliar yang sebagian besar berasal dari dana bagi hasil SDA untuk minyak di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro (LKPP 2008 dalam Bank Dunia, 2011).

Data yang ada menjelaskan bahwa tingkat DBH dari penerimaan pajak lebih besar daripada non pajak. Ini juga dibuktikan dengan data BPS dimana perolehan DBH terbesar diduduki oleh Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Malang. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah dengan mobilitas tinggi yang kaya akan penerimaan pajak, baik pajak bumi dan bangunan maupun pajak penghasilan.

Namun meski demikian, komponen DBH secara keseluruhan baik dari pajak maupun non pajak, jika dilihat dari pendapatan daerah Jawa Timur, meningkat sebesar 10 persen dari Rp. 3,1 triliun pada 2006 menjadi Rp. 4,5 triliun pada 2010. Peningkatan DBH ini

ternyata berdampak terhadap kinerja ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2009-2013.

#### **5.2.1.3. DAU**

Hasil regresi menunjukkan bahwa DAU tidak berdampak terhadap kinerja ekonomi. Jumlah DAU pemerintah kabupaten/kota secara keseluruhan mengalami penurunan walaupun masih merupakan komponen terbesar pendapatan daerah pemerintah kabupaten/kota. Porsi DAU menurun dari 70 persen pada tahun 2006 (Rp. 19,1 triliun) menjadi 55 persen pada tahun 2010 (Rp. 18,7 triliun), (Bank Dunia, 2011).

Pemerintah menetapkan alokasi transfer Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak sesuai dengan kaidah bahwa daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi akan mendapat pasokan DAU yang lebih kecil daripada daerah berkapasitas fiskal rendah demi mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Namun fakta yang terjadi, alokasi DAU tampak belum disesuaikan dengan tingkat pendapatan masing-masing daerah, dimana alokasi DAU tertinggi didapat oleh wilayah dengan PDRB tinggi seperti kabupaten Malang, Jember, Banyuwangi, Kota Surabaya, dan Kediri.

Penurunan alokasi DAU dari tahun ke tahun, disertai alokasi yang tidak memperhatikan kemampuan fiskal setiap daerah, merupakan faktor pemicu DAU tidak berdampak pada kinerja ekonomi Provinsi Jawa Timur periode 2009-2013.

#### **5.2.2. Dampak Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Kinerja Ekonomi Provinsi Jawa Timur**

Hasil regresi menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan dampak positif terhadap kinerja ekonomi. Koefisien sebesar 3.05 berarti bahwa setiap kenaikan 1 juta Lain-lain pendapatan yang sah akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto sebesar 3 juta rupiah.

Lain-lain pendapatan yang sah berasal dari pendapatan hibah, dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian otonomi khusus dari pemerintah, bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, serta pendapatan yang sah lainnya. Komponen pendapatan daerah lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi. Pendapatan lain yang sah dalam lima tahun terakhir (2009-2013) terus mengalami peningkatan. tahun 2009 di Jawa Timur nilainya Rp 26,09 Miliar lebih. Pada tahun 2012 meningkat hingga 2,74 Triliun lebih, dan 2013 menjadi 2,70 Triliun lebih. Pendapatan ini pengelolaannya diarahkan untuk kesejahteraan publik secara umum, (RPJMD 2014-2019 dalam Biro Kesra Jatim).

Fakta ini memberikan petunjuk bahwa penyaluran dana Lain-lain Pendapatan yang Sah secara optimal dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi daerah, sehingga memberikan dampak positif terhadap kinerja ekonomi.



### 5.2.3. Dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Hasil regresi menunjukkan bahwa PAD berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Koefisien sebesar 15.93 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 juta PAD maka akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto sebesar 16 juta rupiah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak, retribusi, lain-lain PAD yang sah, hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah. PAD terbesar mayoritas diduduki oleh kabupaten/kota maju seperti Surabaya, Jember, Kabupaten Malang, Kota Malang, Gresik dan Sidorjo. Sedangkan PAD terendah, mayoritas berasal dari daerah dengan tingkat ekonomi rendah. Hal ini sesuai dengan tingkat produktivitas dari masing-masing kabupaten/kota, dimana daerah dengan tingkat produktivitas tinggi menghasilkan lebih besar PAD daripada daerah dengan produktivitas rendah. Hasil regresi menunjukkan bahwa PAD adalah faktor fiskal terbesar dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah mampu mendorong kemandirian daerah dalam menggali potensi daerahnya.

Komponen PAD mengalami pertumbuhan yang stabil dengan rata-rata 7 persen per tahunnya dari Rp. 7,1 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp. 9,4 triliun pada tahun 2010. Pada pemerintah provinsi, selama 2006-2010, secara rata-rata lebih dari 80 persen PAD provinsi berasal dari pajak daerah. Komponen kedua terbesar dalam PAD provinsi disumbangkan oleh pendapatan daerah lainnya yang sebagian besarnya terdiri dari keuntungan perusahaan besar. Secara rata-rata kontribusi PAD lainnya pada PAD provinsi mencapai 6 persen selama periode 2006-2010. Sumber PAD provinsi lainnya adalah retribusi daerah (4 persen) serta hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada tingkat kabupaten/kota, sumber PAD mayoritas berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Porsi kedua komponen PAD ini hampir sama yaitu rata-rata 36 persen untuk pajak daerah dan 35 persen untuk retribusi daerah selama 2006-2010. (3 persen), (Bank Dunia, 2011).

Besarnya PAD dari pajak ini membuktikan bahwa pajak yang dikelola oleh daerah sendiri mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa mulai tahun 2010 pemerintah pusat menambah unsur penerimaan PAD dengan mendesentralisasikan penerimaan dari Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada daerah setempat. Dengan cara demikian maka sumber penerimaan daerah akan lebih dapat ditingkatkan untuk mendorong pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah. Hal ini membuktikan bahwa implementasi ini berhasil mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja perekonomiannya.

## 6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dijabarkan kesimpulan bahwa pendapatan Jawa Timur periode tahun 2009 hingga 2013 terus mengalami kenaikan. Begitu pula dengan target dan realisasi belanja daerah pada periode tersebut terus mengalami kenaikan meski belum terealisasi 100%.

Hasil regresi menunjukkan DBH, lain-lain pendapatan yang sah, dan PAD berdampak positif terhadap kinerja ekonomi, sedangkan DAK dan DAU terbukti tidak memberikan dampak terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur periode 2009-2013.

## 7. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi kalangan akademis tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi daerah yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu peneliti hanya mengangkat satu variabel eksogen saja yaitu fiskal untuk membahas dampak terhadap kinerja perekonomian Jawa Timur selama periode penelitian. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas pembahasan dan menambahkan jumlah variabel eksogen, karena sebagaimana diketahui bahwa ada banyak faktor yang berdampak pada kinerja ekonomi, khususnya pada peningkatan PDRB.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukri dan Abdul Halim. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali*. Jurnal Ekonomi STEI No. 2/Tahun XIII/25.
- Ariefanto, Doddy. 2012. *Ekonometrika Esensi dan aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga.
- Bahl, Roy W. And Johaness F. Linn. 1992. *Urban Public Finance in Developing Countries*. Oxford University Press.
- Bahl, Roy W. ,2000. *China Evaluating the impact of Intergovernmental Fiscal reform dalam Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Edited by Richard M. Bird and Francois Vaillancourt. United Kingdom : Cambridge University Press.
- Bank Dunia. 2011. *Ringkasan Eksekutif Analisa Pengeluaran Publik Jawa Timur 2011*. Diakses dari <http://siteresources.worldbank.org> pada tanggal 20 Juni 2013.
- Bird, Richard M. And Wallich, C. 1993. *Fiscal Decentralization and Intergovernmental Fiscal Relation in Transitional Economies: Towards a Systematic Framework of Analysis*. Country Economics Departement Working Paper. Washington DC: World Bank.

- Biro Kesra Jatim. 2014. *RPJMD 2014-2019*, diakses dari ro-kesra.jatimprov.go.id. pada tanggal 28 September 2015.
- BPS. 2011. *Analisis Keuangan Kabupaten/Kota*. Jakarta: BPS.
- BPS. 2013. *Analisis Keuangan Kabupaten/Kota*. Jakarta: BPS.
- BPS. 2013. *PDRB Kabupaten/Kota*. Jakarta: BPS.
- BPS. 2014. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2013-2014*. Jakarta: BPS.
- Devas, Nick et al, 1989. *"Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia."* Jakarta: UI-Press.
- Davey, K.J, 1988. *"Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga."* Jakarta: UI-Press.
- Ehtisham, Ahmad; Ma, Jun; Searle, Bob; Piperno, Stefano, 2002. *"Intergovernmental Grant System: Application of a General Framework to Indonesia."* IMF Working Paper No. WP/02/128, International Monetary Fund, Washington DC.
- Fahrian, Sendie Enril. 2013. *Analisis Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur*. Laporan hasil penelitian.
- Hasugian, A. 2006. *Dampak Desentralisasi terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Hermani, A. 2007. *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Perekonomian di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal*. Tesis Magister Sains. Program Pasca Sarjana Intitut Pertanian Bogor.
- Irdhania, Annisa. 2009. *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Perekonomian dan Potensi Keuangan Kabupaten Bogor*. Laporan hasil penelitian.
- Juanda, Bambang dan Junaidi. 2012. *Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasi*. Bogor: IPB Press.
- Kaloh, J, 2002. *Mencari bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Khusaini, Muhamad, 2006, *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang : BPFE Unbraw.
- Lewis, Blane D, 2001. *"Dana Alokasi Umum: Description, Empirical Analysis, and Recommendations for Revision."* Paper Prepared for the Indonesian Regional Science Association Conference (IRSA) 20-21 March 2001, Jakarta, Indonesia.
- LPEM FE-UI, 2001. *"Dampak Penerimaan Dana Perimbangan dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Perekonomian Daerah."* Laporan hasil penelitian.
- Mahi, Raksaka, 2002. *"Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah."* Makalah disampaikan dalam Kursus Reguler Angkatan XXXV, LEMHANAS, Jakarta, 25 Agustus 2002.
- Mahi, Raksaka, 2005. *"Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah."* Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 6, No. 1 Juli.
- Mualim, Mus. 2010. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Peran Kelembagaan Dana Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Barat*. Tesis, Brawijaya.
- Musgrave, Richard A, 1983. *"Who Should Tax, Where, and What ?"* Dalam Wallace E Oates (Ed) *The Economics of Fiscal Federalism and Local Finance*. Edward Elgar, Centelham, United Kingdom.
- Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah. *Buku Pegangan 2009*. Diakses dari <http://www.bappenas.go.id> pada tanggal 20 Juni 2013.
- Rasyid, Ryaas. 2007. *Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depannyadalam Desentralisasi dan otonomi Daerah, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setiono, Dedi NS. 2011. *Ekonomi Pengembangan Wilayah*. Jakarta: FE-UI.
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyanto, 2000. *"Kemandirian dan Otonomi Daerah". Media Ekonomi dan Bisnis*, Vol.XII, No.1 Hal.: 1-7, Semarang : FE UNDIP.
- Sukirno, Sadono. 2008. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Utomo, Sugeng Hadi. Hadi Sumarsono. 2009. *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Efisiensi Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur*. JESP Vol. 1, No. 2.
- Wurzel, Eckhard. 1998. *Germany Reforming Federal Fiscal Relation*. Organization for Economics Development. The OECD Observer.
- Yuliyati, T. 2002. *Potensi Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Kinerja Ekonomi Daerah di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal*. Tesis Magister Sains Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Yunasman. 2007. *Manajemen Keuangan Daerah: Suatu Tinjauan Era UU No 5/1974, Era UU No. 22/1999, dan Era UU No 32/2004*. Dalam Seri Bunga Rampai *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.